

AMBIGUITAS DEMOKRASI: ANTARA OTORITER DAN ANARKISME

Helmizan Za*

Pada zaman Plato dan Aristoteles, demokrasi merupakan salah satu bentuk/sistem kenegaraan di samping aristokrasi, oligarki, timokrasi, dan tyrani. Ketika itu, aristokrasi dipandang sebagai sistem yang terbaik dan tyrani sebagai yang terburuk. Sebaliknya, saat ini demokrasi merupakan pilihan yang terbaik di antara berbagai sistem kenegaraan lain yang cenderung bersifat otoriter sebagaimana sistem tyrani pada zamannya Plato. Sejak Montesquieu meletakkan dasar penataan kekuasaan negara hingga era Bill Clinton yang berupaya menumbuhkan semangat demokrasi guna menghambat sifat yang otoriter/diktator, secara praksis demokrasi tidak pernah lepas dari sifat otoriterisme penguasa, dan sebaliknya melahirkan kebebasan penuh bagi rakyat yang cenderung anarkis. Inilah yang disebut ambiguitas. Ambiguitas demokrasi dapat besekutu dengan otoriter serta anarkis, meskipun secara teoritis demokrasi adalah lawan dari otoriter dan anarkis. Akibatnya, demokrasi bisa berfungsi ganda yakni sebagai alat penataan negara sekaligus sebagai alat pengganti senjata (gun) untuk penaklukan negara lain. Secara teoritis, demokrasi itu baik, namun dalam praktek tetap ambigu. Karena itu, ke depan harus dibangun demokrasi yang berjalan di atas rel konstitusi dengan jiwa kebangsaan yang tinggi.

Hampir seluruh masyarakat dunia mengenal bahwa demokrasi yang dikumandangkan saat ini adalah sebuah sistem kenegaraan yang terbaik, sehingga apa yang terjadi dan dilakukan oleh rakyat atau siapa pun

yang mengatasnamakan rakyat (*demos*) adalah terbaik, dan "Itulah Demokrasi" walaupun akhirnya negara porak-poranda. Padahal kalau mau mencermati seluk beluk demokrasi sebagaimana dipahami kurang lebih 2300

* Drs. Helmizan Za., M.Si. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.

tahun yang lalu - ketika dunia belum begitu mengenal istilah demokrasi meskipun telah menerapkannya - Plato dan Aristoteles telah mengisyaratkan agar berhati-hati dengan demokrasi karena di samping sangat baik, juga sangat kejam sebab dapat menimbulkan anarkis. Melalui Teori *Cyclus Kenegaraan* yang mereka kembangkan dapat dipahami bahwa demokrasi bukanlah satu-satunya sistem yang terbaik. Karena itulah, Montesquieu dan beberapa ahli lainnya berupaya menata demokrasi modern sebagai lembaga kekuasaan yang dapat diterapkan di seluruh dunia. Namun demikian upaya tersebut belum dapat menjamin adanya kedamaian sekaligus menghilangkan tindak kekerasan. Dalam konteks inilah demokrasi masih mengandung bahaya sebagaimana yang pernah diisyaratkan Plato dan Aristoteles.

Persekutuan Demokrasi dengan Otoriter

Negara Paman Sam sangat menyadari bahaya kekerasan dan anarkis dalam sistem demokrasi yang cenderung mendewakan kebebasan rakyat. Karena itu, diciptakanlah sebuah senjata pamungkas untuk menangkalnya yakni "veto". (Pasal 1 ayat 7 Konstitusi AS menyata-

kan bahwa Presiden mempunyai hak veto untuk menghadapi Konggres). Hak veto ini juga dimiliki oleh 5 Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang biasa digunakan untuk merespon permasalahan dunia. Veto memiliki kekuatan untuk menolak sebuah keputusan yang dihasilkan secara demokratis, dan itu berarti ada penjejalan terhadap kedaulatan rakyat. Veto diciptakan sebagai senjata pamungkas untuk menghadang demokrasi. Indikasinya dapat dilihat dari banyaknya aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat guna membatasi kebebasan warga negaranya, seperti adanya ijin untuk menggelar demonstrasi atau unjuk rasa. Jadi, demokrasi menurut versi AS merupakan lembaga yang bukan hanya berperan sebagai penataan kekuasaan, melainkan yang lebih utama adalah penataan kebebasan rakyat.

Dalam menata atau menekan kebebasan dan kekuasaan rakyat, pemerintah menetapkan peraturan yang sebanyak-banyaknya antara lain dengan menyiapkan perangkat hukum yang dapat diterapkan seketika bila terjadi pelanggaran. Namun demikian, untuk mengimbangi belenggu dimaksud disiapkan semacam insentif bagi masyarakat yang tidak mempunyai

pekerjaan tetap berupa santunan atau tunjangan jaminan hidup, serta imbalan yang setimpal kepada petugas/aparat negara sesuai dengan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya tindakan-tindakan anarkis dari rakyat maupun aparat negara. Demokrasi semacam itu sebenarnya mengandung sifat otoriter karena dapat membeleggu kebebasan rakyat dalam kemasakan peraturan hukum dan konstitusi, meskipun tetap ditaati oleh rakyat.

Seiring dengan tumbuhnya AS sebagai negara Super Power tunggal, mereka mengklaim negaranya sebagai raja demokrasi sekaligus mengobarkan secara terbuka beberapa kriteria demokrasi, antara lain: (1) Adanya kebebasan penuh bagi rakyat untuk menentukan pilihan dan pendapatnya, (2) Tidak ada tekanan kekerasan militer, (3) Bebas dari tekanan agama, (4) Ada pengawasan/oposisi dari masyarakat, serta (5) Mengutamakan hak azasi manusia.

Kriteria tersebut sangat ideal sehingga bila dianut oleh negara-negara berkembang dengan kemampuan sumber daya manusia dan ekonomi yang terbatas akan melahirkan anarkis, yang kemudian menjadi sasaran empuk bagi negara yang sudah mapan untuk menanamkan pe-

ngaruhnya.

Negara-negara maju seperti AS sangat menyadari bahwa proses berdemokrasi memerlukan beberapa persyaratan, antara lain: (1) Memiliki kesadaran berbangsa dan nasionalisme yang tinggi, (2) Memiliki kebesaran jiwa dan sportif, (3) Konstitusional (Perundang-undangan, Hukum, dan Peraturan yang ditaati), (4) Terjaminnya kesejahteraan yang memadai bagi rakyat, (5) Terjaminnya keamanan, serta (6) Bebas dari campurtangan asing.

Persyaratan di atas sengaja tidak disebarakan bahkan cenderung ditutupi karena belum dapat dipenuhi oleh negara-negara berkembang, meskipun tetap dipaksa untuk menerapkan demokrasi gaya Amerika. Hal ini dimaksudkan agar bila terjadi kekalutan akibat ketidaksiapan berdemokrasi yang baik, mereka berhak untuk ikut campurtangan demi kepentingan politik globalnya. Kasus penambahan pasal dalam Doktrin Monroe oleh Presiden Theodore Roosevelt tentang adanya wewenang Amerika Serikat untuk campurtangan di manca negara jika suatu negara tidak mampu menangani kekalutan dalam negerinya merupakan sebuah contohnya. Karena itu, tidaklah keliru bila ada pendapat yang mengaitkan peran AS dalam men-

ciptakan kekalutan di negara Indonesia ini.

Sebenarnya ketika menjalankan demokrasi dengan lima kriteria di atas, AS tidak luput dari kekacauan bahkan Perang Saudara. Setelah memiliki enam syarat tuntutan demokrasi, barulah mereka menjalankan demokrasi bahkan berani meninggalkan lima kriteria yang dikobarkannya meskipun banyak pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan lain-lain yang terjadi di dalam negeri. Berbagai pelanggaran tersebut tertutup oleh keras dan gencarnya isu demokratisasi dan HAM yang dikobarkan, sekaligus adanya unjuk kekuatan teknologi, militer, dan ekonomi yang dimiliki sehingga dengan mudah menguasai dunia.

Sementara itu, negara berkembang yang belum siap berdemokrasi dengan baik menjadi mangsa dan ditekan serta dipaksa untuk mengikuti politiknya sehingga berada di bawah pengaruhnya yang setia. Sebaliknya, memuja-muji negara yang dapat melakukan demokrasi dengan 5 kriteria di atas, walaupun negara tersebut menjadi porak-poranda karena belum siap atas tuntutan syarat demokrasi. Jadi, semangat demokrasi yang dikobarkan oleh Negara Paman Sam mengandung dua makna, yakni: (1) Sebagai alat penataan kebebasan rakyat, serta penataan

kekuasaan yang dikemas dalam peraturan hukum/konstitusi, dan (2) Sebagai senjata untuk mendukung keberhasilan politik globalnya, dengan menekan dan memaksa negara-negara berkembang untuk menerapkan demokrasi ala mereka tanpa mengingatkan adanya persyaratan tuntutan demokrasi itu sendiri.

Contoh lain adalah Ayatulloh Komeyni yang dilansir lebih otoriter dalam pemerintahan Iran ketimbang syah Iran sendiri, tapi tetap disebut demokrasi yang sangat baik oleh rakyat maupun oleh Komeyni dan para sahabatnya. Apa yang terjadi di kedua negara tersebut (AS dan Iran) merupakan contoh dari ambiguitas demokrasi dengan wajah persekutuan antara demokrasi dan otoriter. Mengapa hal tersebut dipandang sebagai demokrasi? Sebabnya adalah AS telah memenuhi syarat untuk berdemokrasi sesuai dengan tuntutan dan persyaratan demokrasi ala mereka, sekaligus dipengaruhi oleh posisinya sebagai negara adi daya. Sementara itu, bagi Iran, karena keyakinan akan kebenaran revolusi, bersatu padu dalam jihad dengan Ayatulloh Komeyni sebagai pemimpin revolusi yang sangat dipercaya dan didukung oleh rakyatnya.

Keambiguisan seperti ini bisa

terjadi karena dalam sejarah perkembangan kenegaraan di dunia, sistem demokrasi dan otoriter bisa dipandang baik pada suatu fase tertentu, dan kemudian menjadi jelek pada masa yang lain. Adakalanya suatu negara demokratis dapat membawa keadilan, namun tidak mustahil menghasilkan kesengsaraan bagi masyarakat. Demikian pula sebaliknya, dimana sistem otoriter yang dianggap jelek tidak mustahil dapat mensejahterakan serta memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Jadi antara demokrasi dan otoriter yang dianggap bertentangan dapat pula bersekutu dalam kadar tertentu menurut situasi dan kondisi yang tepat. Demokrasi yang ambigu berwajah otoriter pernah terjadi di negara kita sejak rezim Orde Lama hingga Orde Baru yang kemudian runtuh secara dramatis. Demokrasi berwajah otoriter itu "tidak langgeng" seperti di AS dan Iran sebab baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru kita belum mampu menciptakan adanya jaminan kesejahteraan yang memadai bagi seluruh rakyat sebagai salah satu prasyarat tuntutan demokrasi, apalagi perangkat-perangkat lainnya belum terbangun secara memadai. Akhirnya, yang paling praktis digunakan untuk meredam kebebasan rakyat adalah dengan kek-

erasan senjata. Hal seperti ini juga masih dilakukan di negara-negara lain seperti : RRC, Rusia, Korea Utara, Palestina, serta di negara-negara sedang berkembang.

Persekutuan Demokrasi dengan Anarkis

Persekutuan antara demokrasi dengan anarkis sangatlah berbahaya. Hal ini disebabkan karena anarkis sendiri bukanlah sifat/sistem pemerintahan negara melainkan sebuah tindakan tak terkendali yang berlatar belakang emosi massa, sebagai akibat dari adanya kebebasan rakyat yang tidak mengenal batas konstitusi. Karena itu, sangatlah tepat pemikiran Plato dan Aristoteles bahwa demokrasi yang tidak mengenal batas kebebasan - misalnya dalam menggelar tuntutan atas nama rakyat dan tidak terkendali - dapat menciptakan anarkis. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena semakin memperkuat opini "pembenaran" atas tuntutan golongan yang mengatasnamakan rakyat secara berlebihan. Fenomena seperti ini telah terjadi di negara kita. Lebih ironis lagi, adalah adanya tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan. Kondisi ini cen-

derung menciptakan adanya su-premiasi HAM.

Ketika pertama kali bertemu Gus Dur, Presiden Clinton menyampaikan pujian bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, padahal negara kita semakin tidak bisa berbuat apa-apa dan porak poranda akibat opini massa dan kelompok kepentingan. Bahkan kelompok pengganggu keamanan yang secara terang-terangan bebas melanggar peraturan perundang-undangan negara tidak bisa ditindak secara tegas. Pengganggu keamanan, kelompok separatisme, dan perusuh yang didukung opini/issu HAM semakin bebas menekan dan menghasut rakyat agar tidak percaya pada aparat negara dan hukum yang berlaku. Inilah wajah demokrasi Indonesia. Bila anarkis benar-benar terjadi, maka sangat sulit untuk mengatasinya tanpa harus menimbulkan korban jiwa. Padahal tindakan bersenjata tidak mungkin lagi digunakan, mengingat maraknya isu HAM dan pendapat dunia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa terjadi persekutuan antara demokrasi dan anarkis? Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya, yakni:

Pertama, Kondisi internal Negara Indonesia. Informasi ten-

tang demokrasi sangatlah manis dan menjanjikan, bahkan dipandang sebagai sistem pemerintahan yang terbaik. Apa yang dikehendaki oleh rakyat atau golongan yang mengatasnamakan rakyat adalah yang terbaik dan harus dipenuhi. Akan tetapi selama ini belum banyak yang berani menginformasikan bahaya yang terkandung di balik sistem demokrasi itu sendiri, sehingga katub pengamannya tidak dapat dibentuk. Kondisi internal lainnya adalah kegagalan Orde Baru dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat, yang kemudian diikuti oleh keinginan membangun kekuasaan secara berlebihan sehingga hak-hak rakyat diabaikan. Akibatnya, rakyat tidak percaya terhadap pemerintah Orde Baru berikut perangkat pendukungnya (sistem pemerintahan dan konstitusi), bahkan merembet pada legitimasi pemerintahan baru. Julukan apa pun yang dialamatkan terhadap kebobrokan Orde Baru, baik berupa fitnah dan hujatan maupun pemutarbalikan fakta serta berbagai tuduhan yang berlebihan dipandang oleh masyarakat sebagai hal yang sangat masuk akal dan benar-benar terjadi. Faktor lain adalah menguatnya kelompok kepentingan politik, golongan radikal, serta menguatnya separatisme yang belum tertangani secara tuntas, sehingga

para aktornya lebih leluasa berjuang meraih tujuannya dengan cara menarik simpati serta dukungan luar negeri melalui penyebaran isu yang menyesatkan.

Alasan **kedua**, adalah adanya fenomena global, yang ditandai oleh bergulirnya isu demokratisasi sekuler, isu Hak Azasi Manusia, serta politik global negara maju. Hampir seluruh masyarakat dunia tunduk pada lima kriteria demokrasi yang dikobarkan dalam arus globalisasi, tanpa menyadari adanya persyaratan yang menjadi tuntutan berdemokrasi. Selain itu, isu HAM yang telah mendunia lebih berpihak pada kepentingan internasional dan tidak terikat pada konstitusi/peraturan perundangan suatu negara, bahkan kalau perlu melawan kepentingan nasional suatu negara. Demikian pula dengan kecanggihan teknologi informasi, serta mapannya kekuatan negara maju di segala bidang kehidupan mengakibatkan adanya ketergantungan dari negara-negara berkembang, yang kemudian menciptakan kolonialisme super modern (penjajahan tanpa pendudukan).

Alasan lain (khusus) yang tak kalah pentingnya adalah kuatnya opini massa yang dibangun dari interpretasi yang berlebihan oleh para pengamat dan kelompok kepentingan atas peristiwa-

peristiwa yang terjadi, serta isu yang seolah-olah terjadi sebagai fakta, realita dan kebenaran, seperti: (1) Tuduhan dan tuntutan yang sangat berlebihan terhadap kesalahan para petugas keamanan sehingga mereka terkesan sangat biadab, keji, dan sadis. Akibatnya timbul kebencian, dendam, serta rasa tidak puas yang tiada habisnya sehingga setiap upaya pelurusan dan pengadilan yang benar tidak lagi dipercaya massa; (2) Adanya opini yang telah terbangun sedemikian rupa bahwa selama 32 tahun demokrasi kita terkungkung oleh Orde Baru dan ABRI. Sementara itu, belum ada di antara kita yang berani meluruskan hal ini karena pasti akan terlindas oleh opini massa tersebut. Padahal sejak perang kemerdekaan hingga saat ini sebenarnya kita belum begitu siap untuk menjalankan demokrasi yang sesungguhnya; (3) Merebaknya isu dan pemutarbalikan fakta yang tidak tercounter, yang dapat memperkuat opini bahwa aparaturnya (khususnya TNI/POLRI) dicap sebagai pelanggar HAM. Lebih ironis lagi, aparaturnya tersebut cenderung dipaksa untuk mengakuinya walaupun belum tentu benar. Akibatnya, dendam kepada TNI semakin mendapat dukungan yang luas dari semua komponen bangsa, baik kalang-

an eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dari partai politik dan masyarakat kampus. Demikian pula dengan para pakar dan pengamat politik cenderung memberikan hukuman kepada TNI/POLRI, sehingga gerakan massa yang melawan hukum dan aparat keamanan dipandang sah dan reformis. Pada akhirnya hilanglah kepercayaan terhadap TNI yang letak kekuatannya utamanya adalah "dukungan rakyat". Sebagai konsekuensinya adalah adanya gangguan keamanan, kerusakan, penjarahan, dan pengadilan massa yang tidak dapat dicegah atau dihentikan, karena massa menjadi nekat dan brutal; (4) Pemahaman terhadap tindak "kekerasan" selalu ditekankan dan diarahkan pada tindakan bersenjata sehingga identik dengan militer. Sementara itu, aksi brutal dan provokatif yang berupaya memaksakan kehendak tidak dikategorikan sebagai tindak kekerasan sehingga dianggap sah dan tidak melanggar HAM, bahkan anehnya kita dianggap sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia.

Hal-hal yang Terjadi bila Demokrasi Anarkis Berlanjut

Apa yang telah diperingatkan oleh Plato dalam siklus kenegaraan nampaknya terjadi pada zaman modern ini. Ternyata

kekalutan sudah terwujud, dan bila hal ini tidak bisa diatasi maka akan terjadi malapetaka besar yang berupa perpecahan dan keruntuhan bangsa dan negara. Kecenderungan ini dapat didasarkan kepada beberapa hal, antara lain: (1) Adanya tuntutan yang semakin kuat dan gencar dari kelompok radikal untuk menghapus ideologi dan falsafah bangsa dan negara, dengan cara menteror serta berupaya meledakkan komponen kekuatan bangsa yang memiliki komitmen untuk membela negara. Demikian pula dengan kelompok ekstrim yang berupaya secara terus menerus menciptakan suasana yang anarkis; (2) Adanya tuntutan yang semakin kuat dan transparan dari kelompok separatis untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dengan cara menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Bila pengakuan itu berhasil diwujudkan maka mereka tidak lagi dikategorikan sebagai separatis, melainkan menjadi kelompok pejuang kemerdekaan suatu bangsa yang pada akhirnya dilegitimasi oleh negara-negara di dunia. Sebenarnya kita dapat bersandar dan dilindungi oleh hukum internasional untuk menindak secara tegas dengan kekerasan senjata terhadap kelompok separatis, tapi kita malah semakin tak berdaya; (3) Adanya

support dari Kelompok Anti Golongan, SARA, dan Spion terhadap gerakan yang dimaksudkan di atas, sehingga terbentuk kekuatan yang semakin besar untuk meruntuhkan bangsa dan negara kita yang menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketaqwaan.

Bila kesemuanya itu terjadi maka perang saudara tidak dapat dihindari, karena masing-masing kelompok akan saling berebut kekuasaan, bahkan mungkin menyerahkan diri dan dipecah-pecah oleh bangsa lain yang telah kuat dan mapan. Bila perang saudara atau perpecahan tidak terwujud, minimal bangsa yang besar ini tidak dapat melangsungkan pembangunan sehingga rakyat menderita berkepanjangan. Di pihak lain TNI semakin sulit menyusun strategi untuk menjamin keutuhan bangsa dan negara serta melindungi tanah tumpah darah, sebab ia akan berhadapan dengan berbagai kelompok yang anti padanya, baik dari dalam maupun luar negeri yang bersenjatakan demokratisasi, HAM, dan anarkis. Kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan leluasa oleh pihak asing untuk melakukan intervensi.

Upaya Mengatasi Bahaya Demokrasi Anarkis

Sampai saat ini belum ada

suatu resep yang ampuh untuk mengatasi kondisi anarkis yang terjadi di suatu negara. Fenomena yang diungkapkan di atas pada umumnya terjadi pada negara yang belum mapan, atau karena terjadi perubahan drastis akibat kesalahan Pimpinan Nasional/ pergantian Pimpinan Nasional secara tidak normal. Bila ada gerakan pemberontakan, sebenarnya dapat segera diatasi dengan kekuatan bersenjata, tapi akan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak (kekerasan dibalas dengan kekerasan), bahkan dapat mengundang campur tangan asing.

Untuk mengatasi bahaya persekutuan demokrasi dan anarkis, maka perlu ada suatu kebijakan yang mampu mewartakan aspirasi masyarakat, sekaligus mengobarkan kembali kunci-kunci, kekuatan, dan kemampuan Indonesia sebagai bangsa besar yang memiliki harga diri dan martabat yang tinggi. Bila pendekatan keamanan, politik, ekonomi, bahkan agama tidak berhasil dengan baik, maka tak ada jalan lain yang lebih tepat. Bagaimana pun juga, pemecahan agamis menghadapi tantangan hebat dari dunia internasional yang tengah menyebarkan paham sekularisme dan hedonisme. Pendekatan agamis yang lebih cocok diterapkan dalam pemecahan kemelut bangsa dan negara ini adalah dengan

"jihad". Sayangnya pemahaman tentang jihad pada umumnya ditafsirkan sebagai perang melawan orang atau golongan lain, padahal maknanya tidak sederhana itu. Untuk itu, pemecahan dengan pendekatan agama perlu kajian lebih mendalam dengan suatu asumsi dasar bahwa manusia, rakyat, dan bangsa Indonesia adalah "insan hamba Tuhan".

Ada beberapa langkah-langkah konkrit yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi berbagai kemelut bangsa Indonesia, antara lain: membentuk Komisi Kebenaran Nasional, melakukan rekonsiliasi nasional, mewujudkan pengadilan HAM yang jujur dan adil serta bebas dari tekanan opini massa/dunia, serta menghindari berkembangnya sikap aparat negara yang cenderung mengadu domba aparat keamanan dengan massa. Bahkan aparat perlu didukung secara moril maupun materil untuk bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan konter terhadap berita bohong atau isu-isu yang menyesatkan dengan menunjukkan alasan dan argumentasi yang rasional, melakukan diplomasi secara intensif guna mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan bangsa lain, serta membangkitkan semangat patriotisme - nasionalisme - relegis-

me yang pernah membuat bangsa ini terkenal dan disegani oleh bangsa lain.

Tindakan lain yang perlu segera diupayakan adalah menyusun perangkat hukum yang kredibel dan penegak hukum yang profesional, memupuk kembali kepercayaan pemerintah, aparat negara dan sesama komponen bangsa untuk mewujudkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan, memberikan penjelasan secara benar dan obyektif tentang arti, bentuk, dan makna demokratisasi, HAM, serta fungsi, tugas dan kewajiban warga negara, yang utamanya dilakukan oleh para pakar. Selain itu, bersama pengamat dan praktisi, para pakar perlu membuat berita, analisis, serta pesan yang cermat dan akurat guna menciptakan suasana yang kondusif. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah menghilangkan kesenjangan sosial, terutama kesenjangan ekonomi.

Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan kesadaran seluruh warga negara Indonesia bahwa : (1) Perbedaan pendapat tidaklah berarti harus saling mengalahkan atau menghancurkan di antara sesama komponen bangsa; (2) Baik tindak kekerasan bersenjata maupun tindakan amoral dalam aksi massa tidaklah dapat menyelesaikan masalah, bahkan menambah pen-

deritaan rakyat ; (3) TNI/POLRI adalah komponen kekuatan bangsa yang kekuatan utamanya terletak pada "dukungan rakyat". Karena itu, pemisahan bahkan permusuhan terhadap TNI/POLRI dapat berakibat pada keruntuhan bangsa dan negara ; (4) Pemimpin negara, pejabat dan anggota lembaga legislatif yang telah dipilih dan ditetapkan secara demokratis perlu diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan mesti memperoleh dukungan rakyat.

Demikian pula perlu ditanamkan serta ditingkatkan sikap mawas diri dan kewaspadaan, bahwa : (1) Betatapun tingginya tingkat keamanan dan stabilitas nasional suatu negara (termasuk Indonesia), pasti ada kelompok pelaku dan penggerak konflik, seperti kelompok radikal, ekstrim, separatis, anti golongan, spion negara asing, pembangkang, SARA dan sebagainya. Kelompok tersebut akan berkembang dan menguat, bahkan mengadakan pegabungan untuk mengancam penyelenggara pemerintahan negara, terutama bila situasi dan kondisi negara penuh dengan ketidakpastian akibat kesenjangan dan ketidakadilan; (2) Bahwa tindak kekerasan bersenjata, seperti memuntahkan sebutir peluru mungkin hanya dapat memati-

kan satu jiwa manusia, akan tetapi tindakan seorang provokator bisa membunuh ribuan jiwa manusia, atau paling tidak, dapat menimbulkan penderitaan bagi semua pihak; (3) Bentuk ancaman negara tidak hanya berasal dari luar seperti serangan militer, melainkan juga bisa berasal dari dalam negeri dengan wujud yang bervariasi. Ia masuk dalam segala aspek kehidupan nasional dan tidak mungkin bisa diselesaikan oleh salah satu kelompok kekuatan bangsa saja, melainkan harus dengan kerjasama yang baik dari seluruh komponen bangsa. Karena itu, campur tangan politik negara maju dengan dalih untuk pemulihan stabilitas nasional perlu diwaspadai ; (4) Persaingan bebas dan liberalisasi perdagangan dunia tidak dapat dibendung, sehingga negara yang tidak siap bersaing akan tergilas dan terjajah. Untuk menghadapinya dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan memerlukan persiapan yang matang. Karena itu sangatlah ironis, menghadapi tantangan global itu bangsa kita malah sibuk berkelahi bahkan saling menghancurkan satu sama lain demi kepentingan golongan masing-masing; (5) Jangan mudah percaya atas tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM, pujian demokrasi dan sebagainya, baik oleh media massa mau-

pun komisi bentukan negara maju, karena penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Noam Chamsky, dalam bukunya *Secret, Lies, and Democracy* telah mengungkap tindak kekerasan, diskriminasi dan kebebasan berbohong yang dilakukan oleh pers dan komisi penyelidikan negara Amerika Serikat.

Penutup

Ternyata otoriter dan anarkis tetap eksis dalam suatu demokrasi yang ambigu. Bagi negara yang telah mapan, ambiguitas demokrasi - yang berupa ambiguitas otoriter - digunakan sebagai alat/senjata untuk menata kelangsungan kehidupan negaranya (berfungsi ke dalam), dan sebaliknya merekayasa ambiguitas anarkis sebagai alat pengganti senjata (gun) untuk menaklukkan negara lain (berfungsi ke luar).

Demokrasi yang dilaksanakan di dunia ini sebenarnya masih tetap bersifat ambigu, dan bila tidak diwaspadai akan bisa terseret ke otoriter dan anarkis. Pada awal reformasi, demokrasi Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda awal yang baik, namun sekarang menjadi berambiguitas anarkis yang sangat berbahaya. Kita hanya pandai berteriak "demokrasi", tapi belum mampu memahami dan mencermati arti, makna, serta maksud

dan tujuannya. Karena itu, diperlukan pemantapan pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan.

Demokrasi yang dikobarkan saat ini bersifat sangat sekuler, penuh dengan rekayasa kriteria dan persyaratan, serta tanpa tujuan yang jelas. Padahal demokrasi bermaksud menghilangkan otoriter dan berupaya menata kekuasaan negara sesuai dengan amanat rakyat guna mewujudkan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kata lain, demokrasi menghendaki terwujudnya "Ketahanan Nasional", bukan kekuasaan dan kebebasan bertindak yang dapat menghancurkan bangsa dan negara, dan bukan pula meraih predikat negara "super demokrasi" tapi rakyatnya tetap menderita.

Untuk mengatasi bahaya anarkis, pemerintah Indonesia tertantang untuk tidak menggunakan kekerasan senjata, melainkan dengan mengedepankan kearifan yang dapat menyatukan seluruh komponen bangsa, sehingga tidak menimbulkan korban dan penderitaan. Untuk itu, pengentasan kemiskinan melalui pembenahan ekonomi merupakan prioritas utama dalam pemecahan permasalahan nasional, sekaligus ditopang oleh stabilitas keamanan dan penegakan

supremasi hukum sebagai prasyarat bergulirnya demokrasi yang diinginkan. Lebih dari itu, perlu ditingkatkan kewaspadaan seluruh warga negara melalui pengembangan wawasan nasionalisme, jiwa patriotisme, serta relegisme yang mantap sehingga dapat menjaga keutuhan bangsa dan negara, sekaligus mewujudkan daya saing yang tinggi di percaturan global.

Pemerintah wajib memperhatikan dan memberikan hak-hak warga negara dengan baik. Demikian pula sebaliknya, warga negara perlu menjalankan kewajiban yang mesti diembannya, berupa kewajiban "Bela Negara" dalam arti yang seluas-luasnya. Di pihak lain, meskipun dipersalahkan, dituding serta dimusuhi oleh semua pihak, TNI harus tetap berpikiran positif sebab itu adalah risiko sebagai pembe-la negara, dan itu berlaku universal. Karena itu, kiranya TNI dapat memahaminya sebagai sebuah peringatan besar serta mengambil hikmahnya agar lebih kritis dalam menangkap aspirasi dan kehendak rakyat. Selain itu, TNI seyogianya tetap tegar sebagai kesatria yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sebagai kesatria bangsa hendaknya dapat menjadi pelaku dan pengawal jalannya reformasi, menja-

di penegak demokrasi, serta penjunjung hak azasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertram, Christopher, 1988. *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, diterjemahkan A. Hasymi Ali, Bina Aksara, Jakarta.
- George Mc. T. Kahin, 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesian*, Cornell University Press, Itaca, New York.
- Harold Crouch, 1978. *The Army and Politics in Indonesian*, Cornell University Press, Itaca, New York.
- Herbert Feith, 1978. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesian*, Cornell University Press, Itaca, New York.
- Moh. Mahfud, MD, 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muis A, 1998. "Reformasi Budaya Komunikasi Politik", dalam Masa Kazhim (ed), *Menuju Indonesia Baru, Menggugat Reformasi Total*, Pustaka Hidayat, Bandung.
- Noam Chomsky, 1996. *Secrets, Lies, and Democracy*, Odonion Press, Tucson Arizona.

Prisma, 1998. *Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta dan UII Press, Yogyakarta.

Redaksi Ensiklopedi Indonesia (Penyunting), 1986. *Ensikloedi Indonesia* (edisi khusus), PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

Rober A. Dahl, 1985. *Dilema*

Demokrasi Pluralis, Antara Otonomi dan Kontrol, Rajawali, Jakarta.

Samuel P. Huntington, 1961. *The Common Defence Strategic Programs in National Politics*, Columbia University Press, New York.

Suhino, 1993. *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta.